

**PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**A Standar Pelayanan Miniman (SPM)**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

**B Kerjasama Daerah**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ke Tiga

**C Batas Daerah**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

**D. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**E. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

**F. Dana Kelurahan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan